

Tantangan Pers Nasional Dalam Era Globalisasi

ANA NADHYA ABRAR^{*)}

Abstract

The purpose of this article is to help the Indonesian press in formulating obstacles it faces in making a success of globalization for the benefit of its audiences. This essay will show some adjustments the Indonesian press should make in order to empower its audiences. In this respect, the writer argues that the Indonesian press: (1) does not have to take media panics into consideration, especially with the increasingly rapid dissemination of information superhighway; (2) should be fully aware of the benefit of its audiences in reporting news stories; (3) should report the news stories which would make its audiences well informed and more intellectual; and (4) does not indoctrinate its audiences to behave in accordance to a certain value, but tries to provide some values and points of view.

^{*)} Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

Pendahuluan

Globalisasi telah semakin populer dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam jarak waktu dua tahun istilah globalisasi sudah begitu merasuk ke dalam pembicaraan para pejabat, mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat negara. Masyarakat awam pun merasa begitu akrab dengan istilah globalisasi. Tetapi, sudahkah mereka memahami pengertian yang dikandung globalisasi? Jika sudah, mampukah mereka merealisasikan pengertian itu dalam kehidupan mereka sehari-hari?

Seperti biasa, jawabannya sangat beragam. Ada yang latah dan sok tahu mengenai istilah globalisasi. Ada yang hanya paham dengan pengertiannya, tapi tidak mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula yang mengerti dan mampu mendidik hati mereka sesuai dengan pesan yang dibawa globalisasi. Jumlah kelompok yang terakhir ini sangat sedikit. Tidak berlebihan rasanya bila ada orang yang mengusulkan agar berbagai pihak perlu memasyarakatkan pengertian globalisasi dan kiat-kiat untuk mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Bila berpedoman kepada pendapat ahli sosiologi, sesungguhnya globalisasi mengandung dua dimensi, yaitu obyektif dan subyektif (Yearly, 1996:1). Dimensi obyektif berkaitan dengan semakin meningkatnya usaha-usaha internasionalisasi berbagai kegiatan di berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, hingga budaya. Usaha-usaha ini telah membuahkan hasil, antara lain munculnya istilah dan konsep pasar global, pasar uang global, politik global. Semua istilah dan konsep ini, kemudian, bermuara pada tingkah laku global. Maka, lahirlah apa yang disebut kebudayaan global.

Dimensi subyektif berhubungan erat dengan pandangan individu dan masyarakat terhadap diri mereka sendiri, yang menegaskan bahwa diri mereka adalah warga negara dunia dan perlu berpartisipasi aktif dalam kehidupan dunia. Ada dugaan pandangan ini lahir dari konsep "berpikir global, bertindak lokal". Ada pula dugaan yang mengatakan bahwa pandangan ini lahir berkat kesadaran bahwa dunia sudah semakin menyatu. Terlepas dari benar-tidaknya dugaan-dugaan ini, pandangan seperti itu merupakan dasar yang kuat untuk berperilaku global. Berperilaku global ini sendiri, bagi masyarakat Indonesia, sepertinya sudah menjadi keharusan. Kecuali kalau mereka ingin dilindas oleh perkembangan zaman dan peradaban. Untuk bisa berperilaku global secara tepat, terlebih dulu mereka perlu mengenal ciri-ciri kebudayaan global.

Bagi sebagian ahli sosiologi, kebudayaan global identik dengan standarisasi komoditas, generalisasi nilai-nilai kemanusiaan, penyeragaman makna, dan keterkaitan antara satu sistem komunikasi dengan sistem komunikasi yang lain (Buell, 1994: 292). Sebagian lagi menyebut kebudayaan global sebagai kebudayaan posmodernisme, yaitu "kebudayaan permukaan", yang menolak segala cerita tentang sejarah kebudayaan masa lalu dan masa depan serta yang mengisyaratkan bahwa segala jenis kebudayaan bisa dikombinasikan (Griswold, 1994:149). Kendati demikian, akal sehat akan mengatakan bahwa kebudayaan global berbeda dengan kebudayaan nasional dan kebudayaan regional.

Untuk bisa menyesuaikan diri dengan kebudayaan global, masyarakat Indonesia perlu memperoleh informasi yang bebas hambatan. Sebab, hanya dengan informasi yang bebas hambatan saja mereka bisa (1) Berhubungan dengan masyarakat di daerah/negara lain dengan cepat; (2) Menyalurkan aspirasi dan ekspresi yang menjadikan mereka bisa akrab satu sama lain, meskipun berjauhan tempat tinggal; (3) Mengakses semua hasil-hasil kebudayaan yang muncul di berbagai daerah/negara; dan (4) Meningkatkan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial-politik yang menyangkut seluruh daerah/negara. Singkat kata, informasi bebas hambatan akan mampu memberdayakan masyarakat.

Barangkali ada orang yang menjadi tersentak dengan kenyataan ini. Bukankah untuk bisa menyiarkan informasi yang bebas hambatan pers nasional perlu mengubah penampilan mereka yang sekarang? Memang, pers nasional perlu mengubah penampilan mereka. Tetapi, perubahan itu harus dimulai dari pemerintah. Kalau pemerintah masih mengontrol pers nasional secara ketat, yang rugi, sesungguhnya, adalah masyarakat Indonesia. Di samping tidak bisa menyesuaikan diri dengan kebudayaan global, mereka juga akan ditindas oleh kebudayaan global itu sendiri. Kalau ini benar-benar terjadi, bukan mustahil satu saat kelak masyarakat Indonesia hanya akan "dijajah" oleh bangsa lain.

Tulisan ini akan memperlihatkan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan pers nasional dalam era globalisasi. Semua perubahan itu penulis sebut sebagai tantangan-tantangan yang sedang dihadapi pers nasional. Pembahasan semua tantangan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat Indonesia sebagai khalayak pers nasional dalam era globalisasi dan selalu bertolak dari hakekat keberadaan pers, yaitu: (1) Sebagai pelayan khalayak; (2) Bebas menyiarkan informasi sesuai dengan etika dan nilai jurnalistik; dan (3) Sebagai salahsatu

Adapun tantangan-tantangan yang penulis maksud adalah sebagai berikut.

1. Tidak Mengalami Kepanikan Media

pilar demokrasi.

Ketika *video cassette recorder* (VCR) pertama muncul di Indonesia, sekitar awal tahun 1982, orang-orang yang beruang segera membelinya. Mereka merasa memperoleh alat hiburan yang baru. Sebab, VCR bisa menyajikan film yang selama ini hanya bisa disaksikan di bioskop. VCR bisa merekam siaran televisi. VCR juga bisa memutar filem yang dibuat sendiri dengan kamera video. Lama-kelamaan pembeli VCR makin meluas. Masyarakat dengan pendapatan menengah pun bisa membeli VCR. Siapa yang bisa menyalahkan VCR, kalau orang mulai tergila-gila dengan VCR.

Setelah pemakaian VCR makin meluas, timbul rasa khawatir di kalangan para orang tua dan pendidik. Anak-anak dan para remaja makin sering menonton VCR. Kalau tidak bisa membeli *video tape* (VT) nya, mereka meminjamnya di tempat persewaan. Kadang-kadang mereka menyaksikan filem bertemakan kekerasan dan seksual yang tanpa sensor. Kalau keadaan ini dibiarkan berjalan terus, para orang tua dan pendidik khawatir mental anak-anak dan para remaja akan rusak. Begitulah bertumbuhnya rasa khawatir para orang tua dan pendidik. Makin sehari ke sehari mereka benar-benar khawatir. Mereka mulai panik. Panik inilah, yang sering disebut orang, kepanikan media.

Kepanikan media itu berangsur hilang ketika pemerintah mulai memberlakukan sensor terhadap VT yang datang dari luar negeri. Kepanikan media itu makin hilang setelah pemerintah membuat kriteria tentang perusahaan persewaan VT yang boleh beroperasi. Kepanikan itu hampir hilang sama sekali ketika para orang tua dan guru menyadari bahwa kurikulum sekolah menyebabkan anak-anak dan remaja tidak punya banyak waktu untuk menonton VCR. Orang-orang di Indonesia pun relatif tidak khawatir lagi terhadap VCR.

Selabelas tahun kemudian, di Indonesia mulai dikenal teknologi media *cyberspace*, yang membawa informasi elektronik. Informasi ini kemudian lebih populer dengan sebutan informasi *superhighway*. Sebagian masyarakat di kota-kota besar segera mengaksesnya. Mereka pun terbiasa

dengan pemakaian *internet*, *electronic mail*, *world wide web* (WWW), dan *online communications*. Bagi para pengguna jasa informasi *superhighway* ini, terasa kendala waktu, jarak, jadi sirna. Biaya informasi jadi murah dan informasi yang diperoleh bebas sensor. Mereka pun tidak keberatan membeli komputer, memasang modem dan membayar langganan *provider* tertentu.

Apakah orang bisa menyalahkan informasi *superhighway* kalau sekarang semakin banyak orang Indonesia yang mendambakan bisa mengakses *internet*, *electronic mail*, *WWW* dan *online communications*? Apakah orang perlu menyalahkan kecanggihan teknologi media *cyberspace* karena informasi *superhighway* mulai menggusur kerja jurnalistik? Apakah orang perlu menyalahkan struktur biaya *internet* yang relatif murah (hanya membayar pulsa telepon lokal dan langganan *provider*) karena *internet* mulai mengurangi pendapatan PT Pos Indonesia dan pers nasional? Apakah orang perlu menyalahkan penemu *internet* karena sekarang orang-orang Indonesia bisa mengakses informasi yang tergolong *off the record*?

Informasi *superhighway* di Indonesia memang belum menimbulkan kepanikan media, seperti kepanikan media sewaktu anak-anak dan remaja keranjingan menyaksikan VCR sepuluh tahun lalu. Tetapi, perkembangan yang terjadi sekarang menunjukkan bahwa informasi *superhighway* akan menjadi primadona di masa depan. Bila merujuk pada perkembangan di negara-negara maju, informasi *superhighway* sudah mengurangi ketergantungan beberapa penerbit pada kertas dan wartawan. Beberapa penerbit merasa tidak butuh kertas lagi dalam menerbitkan surat kabar atau majalah mereka. Mereka sudah mengubah surat kabar dan majalah kertas menjadi surat kabar dan majalah elektronik. Lebih dari itu, mereka telah memecat beberapa wartawan olah raga karena berita olah raga bisa ditulis dengan menggunakan program komputer tertentu (Pavlik, 1996:215). Lalu, bagaimana nasib pers nasional? Haruskah para pengelola pers nasional panik?

Sesungguhnya, para pengelola pers nasional tidak perlu panik menghadapi perkembangan teknologi media *cyberspace* dewasa ini. Sedikitnya ada tiga alasan untuk itu. Pertama, kemampuan program komputer menulis berita belum bisa menyamai kemampuan wartawan

menulis berita, terutama dalam menyeleksi fakta yang akan diberitakan. Berita olah raga yang dihasilkan program komputer, seperti disebut Mark Thalhimar, kering, mengungkapkan informasi yang klise dan tidak memiliki perspektif (dalam Pavlik, 1996:215). Program komputer tidak bisa memilih realitas sosial yang bisa mencerminkan kebijakan redaksional sebuah pers nasional. Program komputer, bahkan, tidak bisa “memframing” berita sesuai dengan kebijaksanaan redaksional.

Kedua, muatan informasi *superhighway* berbeda dengan muatan informasi pers nasional. Dalam lalu lintas informasi *superhighway*, setiap khalayak dituntut menyaring informasi dan kalau perlu memberikan informasi yang benar. Kalau ini tidak terpenuhi, khalayak akan dilanda kecemasan informasi. Mereka akan tenggelam dalam lautan informasi yang begitu banyak tanpa tahu informasi yang bermanfaat buat mereka. Mereka akan sering penasaran melihat banyaknya informasi yang hanya bersifat pergunjungan tapi direkayasa seseorang menjadi isu internasional. Maka, khalayak yang tidak punya banyak waktu untuk memenuhi tuntutan ini akan akan “berpaling” kembali kepada surat kabar dan majalah.

Ketiga, informasi *superhighway* lahir sebagai tuntutan perkembangan zaman, yang membawa kepentingan ekonomi, sosial dan budaya negara-negara maju, terutama negara yang menganut paham liberal. Kalau bangsa dan pemerintah Indonesia memang tidak suka dengan paham liberal, tentu bangsa Indonesia akan cepat bosan dengan informasi *superhighway*. Mereka akan menganggap informasi *superhighway* sebagai neraka yang diciptakan oleh orang lain buat mereka. Lalu, daripada repot sendiri, mereka memilih “bertahan” dengan membaca surat kabar dan majalah.

2. Memelihara Kepedulian Terhadap Kepentingan yang Lebih Tinggi

Khalayak membaca surat kabar dan majalah untuk mengetahui informasi. Dari informasi yang terbaca, biasanya, mereka mengharapkan tiga perkara, yaitu: (1) Peristiwa yang dilaporkan benar-benar terjadi; (2) Kejadian (*happening*) peristiwanya persis seperti yang dilaporkan; dan (3) Bagian-bagian peristiwa yang penting buat mereka memperoleh liputan yang lebih banyak. Setelah mengetahui ketiga perkara ini, mereka mencernakan isi pesan dan memberinya bingkai sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. Maka, lahirlah inspirasi untuk merespons peristiwa

yang terjadi. Respons ini bisa berupa komentar, pendapat, sikap dan bahkan pedoman untuk berbuat.

Dalam menanggapi pemberitaan kemelut di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) akhir Juni 1996 misalnya, khalayak juga berbuat demikian. Mereka mengharapkan bahwa: (1) Pertikaian antara Kelompok 16 (Fatimah Achmad dan 15 fungsionaris DPP PDI pendukung kongres di Medan 20-22 Juni 1996) dan kelompok Megawati (11 fungsionaris DPP hasil Munas PDI di Jakarta tahun 1993) tidak direkayasa oleh pihak lain untuk menjatuhkan Megawati; (2) Pemerintah benar-benar ingin menjadikan Kongres PDI di Medan sebagai modus pemecahan masalah yang dihadapi oleh PDI; dan (3) Pengaduan kelompok Megawati kepada pejabat tinggi pemerintah mendapat perhatian yang serius, sebab Megawati adalah ketua DPP PDI yang sah. Kalau semua ini terjadi, barulah khalayak disebut memiliki informasi yang mampu menjadi sumber inspirasi politik yang masuk akal.

Tetapi, yang terjadi tidak seperti yang diharapkan khalayak. Khalayak melihat pertikaian antara Kelompok 16 dan Kelompok Megawati direkayasa oleh pihak lain dengan maksud untuk menjatuhkan Megawati dan PDI. Ini masuk akal. Sebab, ada orang yang menyamakan Megawati dengan Indira Gandhi dari India dan Benazir Bhutto dari Pakistan (Asiaweek 21/6/1996:34) dan menurut Abdurrahman Wahid, popularitas PDI akhir-akhir ini meningkat karena menjadi simbol kehidupan politik yang bermoral (Kompas 6/6/1996:1).

Khalayak juga melihat bahwa Kongres PDI di Medan tidak menyelesaikan masalah. Sebab setelah kongres usai, semakin banyak warga dan pendukung PDI yang menyatakan dukungan mereka kepada Megawati. Megawati sendiri, 23 Juni 1996, menyerukan kepada DPD dan DPC PDI di seluruh Indonesia untuk segera melakukan Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang PDI (Kompas 24/6/1996:1).

Lebih dari itu, pers nasional memberitakan bahwa pejabat tinggi pemerintah terkesan dingin menanggapi pengaduan Megawati. Mendagri misalnya, berusaha mengelak bertemu dengan Kelompok Megawati. Ketika Kelompok Megawati minta bertemu dengan Mendagri untuk membicarakan kapan Mendagri bisa menerimanya, Mendagri buru-buru pergi dengan alasan

ada urusan lain yang harus ia hadiri (Gatra 22/6/96:35). Maka, orang akan sampai pada hipotesis bahwa berita tentang kemelut PDI akhir Juni 1996 belum menjadi inspirasi politik yang masuk akal.

Salahkah pers nasional memberitakan kemelut PDI seperti tersebut di atas? Pers nasional tidak salah. Sebab, realitas sosial yang terjadi memang begitu. Mungkin sebagian khalayak tidak ingin membaca segala kejelekan kehidupan sosial-politik lewat surat kabar atau majalah. Mungkin sebagian khalayak tidak ingin melihat segala kecurangan dalam kehidupan politik lewat surat kabar atau majalah. Membaca betapa dinamika politik mulai mengarah pada “main kayu” dalam memperjuangkan kepentingan, barangkali sebagian khalayak memilih tidak mau membaca surat kabar atau majalah. Semuanya terserah pada khalayak.

Hanya saja pers nasional perlu memelihara kesetiiaannya untuk memenuhi kebutuhan informasi khalayak. Pengertian informasi sendiri berubah mengikuti perkembangan zaman. Dulu orang akan mengatakan bahwa informasi adalah pengetahuan atau berita tentang beberapa fakta atau kejadian. Tetapi, sekarang, informasi adalah sesuatu yang belum diketahui orang (Noth, 1990:134). Dari sudut pandang khalayak, hanya berita yang memiliki nilai berita saja yang mereka anggap sebagai informasi. Wajar bila orang kemudian mengatakan bahwa informasi memiliki dua dimensi, yaitu dimensi semantik dan pragmatik.

Dalam memenuhi kebutuhan informasi khalayak, pers nasional perlu memelihara kepedulian terhadap kepentingan yang lebih tinggi, yaitu mengutamakan kepentingan khalayak. Menilik kenyataan sekarang orang akan mengatakan bahwa pers nasional dewasa ini belum bisa merealisasikan kepedulian terhadap kepentingan khalayak. Sebab, ada tiga kendala yang dihadapi pers nasional. Pertama, kondisi obyektif negara sekarang belum memungkinkan pers nasional berbuat begitu. Pers nasional masih terpaksa harus menyiarkan berita yang sesuai dengan kehendak penguasa. Inspirasi politik yang lahir dari berita yang disiarkan pers nasional sering tidak masuk akal. Tidak heran bila sebagian yang ingin “memelihara” akal sehat mereka enggan membaca berita yang disiarkan pers nasional. Atau walaupun terpaksa membaca berita yang disiarkan pers nasional, mereka akan bersungut-sungut setelah membacanya. Sebab, akal sehat mereka

mengatakan bahwa pesan yang dibawa berita itu justru memperdaya khalayak, bukan memberdayakan khalayak.

Kedua, hubungan wartawan dengan pemilik modal pers nasional adalah hubungan kerja “bisnis”, bukan hubungan ideologis. Para wartawan tidak bisa berargumentasi dengan pemilik modal soal idealisme pers. Mereka hanya bisa berdialog perkara bagaimana cara mengejar keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kalau mereka tidak suka, mereka akan diminta manajemen untuk mundur. Maka, wartawan tidak mampu mengubah penampilan pers nasional sekarang ini.

Ketiga, organisasi wartawan resmi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), belum menunjukkan kemandiriannya. Ini bisa dilihat misalnya, dari ketidakmampuan PWI membela kepentingan wartawan bila berhadapan dengan pemilik modal pers nasional. Dalam sengketa antara wartawan dengan pemilik modal, ada kesan PWI tidak bisa “menekan” pemilik modal. Sudah begitu, PWI belum mampu menolak kepentingan pemerintah dalam berurusan dengan anggota-anggotanya. PWI seolah-olah menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam sebagian besar kiprahnya.

Tetapi, tidak berarti pers nasional boleh tidak peduli terhadap kepentingan yang lebih tinggi. Pers nasional perlu memelihara kepedulian terhadap kepentingan yang lebih tinggi. Pers nasional tidak boleh larut oleh keadaan yang memaksanya peduli terhadap kepentingan pemerintah.

Lalu, bagaimana cara pers nasional memelihara kepedulian terhadap kepentingan yang lebih tinggi? Salahsatu cara yang asuk akal adalah meningkatkan kesetiakawanan pers nasional. Untuk itu, diperlukan kerendahan hati para pengelola pers nasional untuk saling berinteraksi. Dari interaksi ini bisa dirumuskan cara-cara untuk tujuan bersama yang lebih luas. Dari interaksi ini juga bisa diketahui kendala-kendala khusus yang dihadapi pers nasional dalam memelihara kepedulian terhadap kepentingan yang lebih tinggi. Dari interaksi ini juga bisa lahir persatuan penerbit nasional yang efektif untuk merealisasikan kepedulian pers nasional terhadap kepentingan yang lebih tinggi.

Sesungguhnya interaksi ini sudah dimulai oleh kelompok-kelompok penerbit pers nasional yang tergabung dalam konglomerasi pers, seperti *Kelompok Kompas Gramedia*, *Kelompok Jawa Pos*, *Kelompok Kartini*,

Kelompok Femina, Kelompok Republika, Kelompok Gatra, dan sebagainya. Tapi, interaksi ini masih terbatas pada kepentingan bisnis dan belum meluas ke luar sebuah konglomerasi pers. Wajar kalau hasilnya berupa realisasi kepentingan bisnis konglomerasi pers bersangkutan. Nah, kalau hasilnya juga ingin dirasakan khalayak, tibalah saatnya interaksi itu diperluas ke luar konglomerasi pers dan menyangkut kepentingan yang lebih tinggi.

Lewat kesetiakawanan pers nasional juga bisa dianggarkan pembagian yang relatif adil pangsa pasar pers nasional. Dengan begitu orang tidak akan mendengar lagi manajemen perusahaan sebuah majalah mohon sebuah agen untuk menunda beredarnya majalah saingannya dengan ancaman tidak akan menjual majalahnya (yang nota bene lebih populer) ke agen bersangkutan. Orang tidak akan mendengar lagi ada "main kayu" dalam merebut pangsa pasar pers nasional. Orang hanya mendengar persahabatan yang akrab dan pergaulan yang hangat di antara sesama pers nasional.

3. Mengusahakan Informasi yang Mencerdaskan Khalayak

Sesungguhnya, pers nasional dewasa ini belum mampu menjadi distributor informasi yang memiliki pengaruh sangat kuat. Kendati pers nasional sudah menggunakan teknologi komunikasi yang mutakhir, ia belum bisa menyajikan data yang akurat sebagai bahan dasar pertimbangan keputusan. Ia sulit diandalkan untuk mengetahui secara persis kejadian yang bersifat kontroversial. Tidak heran bila makin banyak khalayak yang mencari pers asing untuk memperoleh informasi tentang isu kontroversial yang terjadi di Indonesia.

Kenyataan semacam ini disadari sepenuhnya oleh para pengelola pers nasional. Tetapi, karena pengaruh pemerintah pada pers nasional sangat kuat, mereka hanya mampu meningkatkan kualitas pemberitaan pers nasional dalam batas-batas yang diberikan pemerintah. Mereka pun berusaha mengikis kecurigaan bahwa pemerintah sengaja membatasi ruang gerak pers nasional demi kepentingan pemerintah. Dengan demikian mereka menjadi tenang.

Tetapi, ketenangan itu tidak bertahan lama. Para pengelola pers nasional mulai gusar dengan berkurangnya pemasang iklan di surat kabar atau majalah. Melihat pemasang iklan di televisi swasta, mereka khawatir

pemasang iklan yang selama ini setia memasang iklan di surat kabar atau majalah mereka, akan beralih memasang iklan ke televisi swasta. Kalau kekhawatiran ini benar-benar terjadi, maka bukan mustahil pers nasional yang kecil akan bangkrut. Bukankah di Amerika Serikat, seperti dilaporkan George Quester, beberapa majalah khusus terpaksa gulung tikar karena para pemasang iklan yang biasanya memasang iklan di situ, beralih ke televisi (1990:240)?

Bisa saja orang mengusulkan, untuk keluar dari kemelut ini, pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok pers nasional untuk mendirikan stasion televisi swasta. Dengan begitu pers nasional tidak perlu lagi memikirkan soal penerimaan iklan. Kehidupan perusahaan pers nasional pun bisa "normal" kembali. Ia bisa lebih berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan informasi khalayak.

Tetapi, apakah ada jaminan bahwa usul ini bisa diterima pemerintah? Jangankan diterima, mengusulkan saja, barangkali pers nasional tidak mau! Sebab, pemerintah, lewat Menteri Penerangan, berulang kali mengatakan bahwa lima stasion televisi swasta sudah cukup buat Indonesia. Lalu, bisakah orang mengatakan bahwa pemerintah benar-benar memiliki komitmen pada pers nasional?

Secara umum, komitmen pemerintah pada pers nasional bisa dilihat lewat empat indikator. Pertama, keinginan pemerintah untuk membiarkan pers nasional terbit sepanjang waktu. Dari sisi ini, kelihatan pemerintah memiliki komitmen yang cukup besar pada pers nasional. Pemerintah menganggap pers nasional sebagai mitra pemerintah dalam menginformasikan keberhasilan pembangunan. Pemerintah sangat peduli dengan perkembangan pers nasional. Begitu pedulinya, sehingga puncak setiap peringatan Hari Pers Nasional selalu dihadiri oleh Presiden Soeharto.

Kedua, keinginan pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi penerbitan pers nasional. Ini bisa dirinci lagi menjadi kemudahan bagi penyediaan kertas, masuk dan terpakainya teknologi komunikasi yang canggih, perolehan kredit, dan sebagainya. Dari segi ini, tampaknya pemerintah memiliki komitmen yang cukup besar juga pada pers nasional. Ini bisa terlihat dari peristiwa kelangkaan kertas koran beberapa waktu lalu. Ketika itu pemerintah memberikan keringanan harga kertas koran buat pers nasional.

Ketiga, keinginan pemerintah untuk memberikan kebebasan pada pers nasional untuk menyiarkan berita yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik PWI dan Undang-Undang. Dari sisi ini, kelihatan pemerintah belum punya komitmen yang cukup besar. Sebab, para pengelola pers nasional sering mengeluh bahwa ada peraturan di luar keduanya yang harus ditaati pers nasional. Peraturan yang dimaksud bersifat abstrak dan kadang-kadang dipaksakan secara sepihak. Sudah begitu, pejabat pemerintah masih sering mengatakan bahwa sumber resmi dari sebuah peristiwa yang kontroversial hanya aparat pemerintah.

Keempat, keinginan untuk memberikan informasi yang mencerdaskan khalayak. Dari segi ini, tampak pemerintah belum memiliki komitmen yang cukup besar. Lihatlah, masih sering kita jumpai pejabat pemerintah yang bersikap emosional ketika memberikan keterangan kepada pers. Ketika seorang pejabat pemerintah tidak punya argumentasi lagi mengenai mengapa orang-orang yang mempertahankan hak mereka harus digusur, ia mengatakan bahwa orang-orang itu anti pembangunan, anggota organisasi tanpa bentuk (OTB). Ketika seorang pejabat tidak memiliki lagi jalan ke luar dari permasalahan yang muncul akibat ketimpangan sosial, ia dengan tenang mengatakan bahwa masalah itu muncul karena "dikipas" oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ketika ada musibah yang berawal dari ketidakbecusan seorang pejabat pemerintah, seorang pejabat pemerintah lainnya berpendapat bahwa masyarakat tidak memahami apa yang dimaksud si pejabat.

Dengan komitmen pemerintah pada pers nasional yang belum "sempurna" ini, tentu sulit mengharap pers nasional mampu menyiarkan berita yang mencerdaskan khalayak. Ini sekaligus juga mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mengubah struktur pengaruhnya pada pers nasional kecuali pemerintah tidak ingin mencerdaskan khalayak.

4. Memberi Peluang Pada "Nilai-Nilai" Lain

Harian pagi *Asahi Shimbun*, 21 Juni 1996, menyiarkan berita tentang hasil penyelidikan Tim Penelitian Kecelakaan Penerbangan (TPKP) Departemen Perhubungan (Dephub) Jepang terhadap penyebab kecelakaan pesawat DC-10 milik Garuda di Bandara Fukuoka 13 Juni 1996. Berita itu menyebutkan antara lain: (1) Data yang tersimpan dalam *flight re-*

order menunjukkan bahwa sistem kendali dan lepas landas pesawat Garuda tersebut berfungsi normal; (2) Data yang direkam *voice recorder* tidak mencatat bunyi *alarm* yang mengisyaratkan kerusakan mesin; (3) Setelah pilot memindahkan *power* maksimum ke minimum dan mengerem pesawat secara mendadak, barulah terjadi kerusakan mesin; dan (4) TPKP Dephub Jepang akan terus meneliti mengapa pilot memutuskan untuk tidak lepas landas, sementara kecepatan pesawat sudah mencapai V1, yaitu kecepatan untuk siap lepas landas.

Berita ini, sesungguhnya, membuka kemungkinan bahwa faktor manusialah yang menjadi penyebab terbakarnya pesawat DC-10 milik Garuda di Bandara Fukuoka. Kendati begitu, TPKP Dephub Jepang tidak berani menyebutkannya secara eksplisit. Tim ini akan berusaha mencari penyebab yang pasti. Sebaliknya, pemerintah Indonesia, melalui Dirjen Perhubungan Udara, Zainuddin Sikado, sudah memastikan bahwa pesawat Garuda yang naas itu terbakar karena kerusakan mesin. Pers nasional, seperti *Kompas*, telah menyiarkan pernyataan Zainuddin tanggal 17 Juni 1996.

Bila membandingkan pernyataan Zainuddin dan TPKP Dephub Jepang, orang jadi bingung dan terdorong untuk mempertanyakan: (1) Mengapa pemerintah begitu cepat sampai pada kesimpulan bahwa penyebab terbakarnya pesawat DC-10 milik Garuda di Bandara Fukuoka adalah kerusakan mesin? (2) Bagaimana sikap ideal pers nasional dalam memberitakan kecelakaan pesawat DC-10 milik Garuda di Bandara Fukuoka? dan (3) Bagaimana pula sikap ideal pers nasional dalam menyiarkan berita yang kontroversial? Jawaban semua pertanyaan ini berkaitan dengan komunikasi politik.

Sering dikatakan orang bahwa komunikasi politik ditandai oleh penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan dinamika politik, terutama aktor politik (sejak dari masyarakat awam, lembaga-lembaga pemerintah, partai politik, gerakan-gerakan sosial hingga kelompok-kelompok kepentingan) baik sebagai pengirim maupun penerima pesan. Dalam menyampaikan pesan, para aktor politik cenderung berpedoman pada konsep-konsep tentang kekuasaan, ideologi, kepentingan politik, konflik dan konsensus. Tidak heran bila pesan yang disampaikan dikemas dengan cara persuasif. Begitu menonjolnya sifat persuasif ini, sehingga tidak jarang tergelincir pada usaha memanipulasi pesan.

Ketika Zainuddin Sikado menyampaikan pernyataan tentang penyebab terbakarnya pesawat DC-10 Garuda di Bandara Fukuoka, sesungguhnya ia melakukan komunikasi politik. Ia haruslah dipandang orang sebagai wakil pemerintah yang sedang menyampaikan pesan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Zainuddin akan selalu menjaga citra positif pemerintah. Ia tidak akan mau mendiskreditkan pejabat pemerintah. Apalagi pada saat-saat seperti itu, ketika semua pejabat pemerintah berlomba-lomba mengambil simpati masyarakat untuk kemenangan Golkar pada Pemilu 1997.

Mengikuti pemahaman seperti di atas, masuk akal bila ada orang yang curiga bahwa Zainuddin ingin secepatnya “menutup” kasus kecelakaan pesawat DC-10 milik Garuda di Bandara Fukuoka. Wajar bila ada orang yang curiga bahwa pemerintah tidak mau kehilangan “muka” dalam kasus kecelakaan pesawat DC-10 milik Garuda di Bandara Fukuoka. Tidak heran bila ada orang yang berpendapat bahwa pemerintah terpaksa mengatakan bahwa penyebab kecelakaan pesawat DC-10 milik Garuda di Bandara Fukuoka adalah faktor mesin, bukan faktor manusia. Bukankah akal sehat akan mengatakan bahwa semua sikap itu bermuara pada terpeliharanya citra positif pemerintah? Bukankah akal sehat akan mengatakan bahwa semua sikap itu bisa menimbulkan “simpati” khalayak sehingga mereka menghimbau pemerintah untuk membeli pesawat yang lebih baru, misalnya dengan pinjaman luar negeri? Secara umum komunikasi politik antara pejabat pemerintah dan masyarakat lebih banyak berlangsung lewat media massa, baik milik pemerintah maupun swasta. Kebijakan redaksional kedua kelompok media massa ini jelas berbeda. Media massa pemerintah selalu berusaha menjadi corong pemerintah. Sedangkan media massa swasta (selanjutnya disebut pers nasional) berpihak pada khalayak. Tapi, kenyataan menunjukkan, dalam memberitakan kejadian yang kontroversial, pers nasional sering “mengekor” pada media massa pemerintah, yaitu berpihak pada pemerintah.

Sepintas lalu, sikap pers nasional yang berpihak pada pemerintah tidak bisa kita salahkan. Sebab, keberpihakan itu tidak menyimpang dari “cara kerja jurnalistik”, yaitu menyiarkan fakta yang bersumber dari pejabat pemerintah. Ambil contoh tentang pernyataan Zainuddin Sikado tentang penyebab terbakarnya pesawat DC-10 milik Garuda di Bandara Fukuoka.

Yang disiarkan pers nasional adalah fakta yang disampaikan Zainuddin, bukan fakta yang direkayasa. Orang yang menyampaikan informasi itu ada dan orang bisa mengkonfirmasi pernyataannya kepada orangnya. Tapi, ada fakta yang kurang di situ. Pers nasional tidak menyiarkan kemungkinan lain, misalnya hasil sementara penyelidikan TPKP Dephub Jepang. Pers nasional seolah-olah menutup diri terhadap kemungkinan fakta yang lain. Pers nasional seolah-olah mendidik khalayak untuk menerima satu “nilai” saja dan menolak “nilai” yang lain. Padahal “nilai-nilai” yang lain itu juga diperlukan khalayak untuk menentukan sikap yang tepat dalam merespons kecelakaan pesawat DC-10 milik Garuda di Bandara Fukuoka.

Pada titik ini, seyogyanya, pers nasional perlu meningkatkan kepeduliannya terhadap etika jurnalistik dalam berhubungan dengan pemerintah. Pers nasional tidak menolak “nilai-nilai” yang dilontarkan pemerintah, tapi tidak pula menutup diri terhadap “nilai-nilai” yang lain. Dengan begitu pers nasional mampu menyiarkan berbagai perspektif dari sebuah kejadian. Kalau ini bisa direalisasikan, maka pers nasional sudah mencapai salahsatu tujuan hakikinya, yaitu menjadikan dirinya sebagai lembaga yang melayani kepentingan informasi khalayak dengan mengutamakan kepentingan khalayak.

Bagi para pengamat komunikasi, komunikasi politik sering dianggap mengabaikan kebenaran. Sebab, isi pesannya dirancang berdasarkan ideologi dan kepentingan politik tertentu. Ini, seharusnya, juga perlu menjadi perhatian pers nasional. Perhatian terhadap kenyataan ini menjadi sangat penting karena pers nasional, sesungguhnya, adalah “mesin politik”. Jika pers nasional tidak waspada terhadap kemungkinan terjadinya manipulasi kebenaran, maka ia bisa menyesatkan khalayak. Ia pun bisa dianggap mengkhianati kepercayaan khalayak.

Bisa saja orang lebih tertarik dengan etika komunikasi politik dalam kejadian-kejadian kontroversial yang melibatkan pejabat pemerintah, misalnya tentang pesan yang disampaikan pejabat pemerintah mengenai kejadian itu. Tapi, tidak ada salahnya pers nasional mengikuti jejak orang

Memberikan peluang pada “nilai-nilai” lain menjadi penting bagi pers nasional dalam rangka mengusahakan demokrasi yang lebih baik lagi. Kalau pers nasional sudah menyiarkan “nilai-nilai” yang beragam dalam berita-beritanya, maka pelaksanaan salahsatu unsur yang membangun demokrasi sudah tercapai. Bukankah Manuel Pares i Maicas pernah berkata bahwa kesan demokratis dibentuk oleh penampilan berita pers dan hasil jajak pendapat? (1995:484).

Kesimpulan

Bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan kata globalisasi, semua orang tentu setuju. Tetapi, ketika melihat kesiapan masyarakat Indonesia menghadapi era globalisasi, sebagian besar orang akan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia belum siap. Sewaktu melihat perilaku masyarakat Indonesia memaknai kebudayaan global, sebagian besar orang menilai bahwa masyarakat Indonesia belum siap.

Sementara itu, suka atau tidak suka, globalisasi menggelinding terus. Negara-negara di berbagai belahan bumi makin peduli dengan globalisasi. Negara-negara industri maju, dalam akhir pertemuan mereka di Lyon, Perancis, 30 Juni 1996, bahkan mengeluarkan deklarasi ekonomi yang berjudul “Menjadikan Globalisasi Bermanfaat Buat Semua Bangsa”. Maka, mau tidak mau, Indonesia harus berbenah diri.

Dalam kasus Indonesia, persoalan menyangkut globalisasi yang harus ditangani secara serius adalah, arus informasi bebas hambatan. Sebab, sampai saat ini, masih terlihat ketidaklancaran informasi dari pers nasional pada khalayak. Masih ada kesan bahwa pers nasional belum memberdayakan khalayak secara optimal. Sedikitnya, pers nasional perlu melakukan empat perkara untuk menangani masalah ini, yaitu, *pertama*, pers nasional tidak perlu mengalami kepanikan media menghadapi perkembangan informasi *superhighway* dan teknologi media *cyberspace*. Khalayak tidak akan begitu saja berpaling pada informasi *superhighway*. Tetapi, kalau pers nasional masih “berasyik-asyik” dengan diri sendiri, tanpa informasi *superhighway* pun, khalayak akan berpaling dari pers nasional.

Kedua, pers nasional perlu memelihara kepedulian terhadap kepentingan yang lebih tinggi, yaitu mengutamakan kepentingan khalayak dalam segala pemberitaannya. Untuk itu perlu diciptakan kesetiakawanan pers nasional. Kesetiakawanan ini akan terbentuk bila semua pers nasional berinteraksi dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil secara intensif, baik membicarakan aspek bisnis pers maupun aspek idiiil pers.

Ketiga, pers nasional perlu mengusahakan informasi yang mencerdaskan khalayak. Upaya ini, sesungguhnya, berkaitan dengan komitmen pemerintah pada pers nasional. Kalau selama ini komitmen pemerintah pada pers nasional diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu: (1) Membiarkan pers nasional terbit setiap hari dan (2) Memberikan kemudahan bagi penerbitan pers nasional, maka sudah saatnya pemerintah memberikan komitmen dalam dua bentuk yang lain, yaitu: (1) memberikan kebebasan kepada pers nasional menyiarkan berita sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik PWI dan Undang-Undang dan (2) Merangsang pers nasional untuk menyiarkan berita yang memelihara akal sehat khalayak dan tidak memasyarakatkan sikap “suka-tidak suka”.

Keempat, pers nasional perlu memberi peluang pada “nilai-nilai” lain. Ini adalah salahsatu bentuk kepedulian pers nasional pada usaha demokratisasi. Usaha pers nasional untuk menyempurnakan demokrasi di Indonesia tidak akan pernah berhasil jika pers nasional hanya menyiarkan “nilai-nilai” yang dilontarkan pemerintah saja. Lebih dari itu, memberi peluang pada “nilai-nilai” lain adalah bentuk penghargaan pers nasional pada khalayak. Bukankah ia menyiratkan bahwa pers nasional tidak mendikte khalayak?

Referensi

- Buell, Frederick. 1994. *National Culture and New Global System*. Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press.
- Griswold, Wendy. 1994. *Cultures and Societies in a Changing World*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Pine Forge Press.
- Noth, Winfried. 1990. *Handbook of Semiotics*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
- Pares I Maicas, Manuel. 1995. "The Ethics of Political Communication". Dalam *European Journal of Communication*, Volume 10, No. 3, hal. 475-495.
- Pavlik, John V. 1996. *New Media Technology: Cultural and Commercial Perspectives*. Boston, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore: Allyn and Bacon.
- Quester, George H. 1990. *The International Politics of Television*. Lexington, Massachusetts, Toronto: Lexington Books.
- Yearly, Steven. 1996. *Sociology, Environmentalism, Globalization*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.

Surat kabar :

- Asahi Shimbun*, Tokyo, 21 Juni 1996.
- Japan Times*, Tokyo, 30 Juni 1996.
- Kompas*, Jakarta, 6 Juni 1996.
- _____, Jakarta, 17 Juni 1996.
- _____, Jakarta, 24 Juni 1996.

Majalah :

- Asiaweek*, Cause Bay, Hong Kong, 21 Juni 1996.
- Gatra*, Jakarta, 22 Juni 1996.